

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- BPS Kabupaten Natuna. (2022). *Kecamatan Serasan Dalam Angka Dalam 2022*. Natuna: BPS Kabupaten Natuna.
- BPS Kabupaten Natuna. (2026). *Kabupaten Natuna dalam Angka 2020*. Natuna: BPS Kabupaten Natuna.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. Los Angeles: SAGE Publication.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Humaidah, I., Harjo, S., Soleha, D., & Ningsih, N. S. (2021). *Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara*. Jakarta Pusat: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
- Pemerintah Kecamatan Serasan. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Serasan Tahun 2025*. Serasan: Pemerintah Kecamatan Serasan.
- Pramono, B. (2025). *PENJAGA KEDAULATAN: Membangun Kekuatan di Beranda Depan Negeri Fokus pada Peran Pertahanan dan Pembangunan di Wilayah Perbatasan*. Jawa Barat: CV Aksara Global Akademia.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rusmiyati, Faridah, M., Alma'arif, & Nooraini, A. (2022). *Manajemen Perbatasan*. Bandung: Cendekia Press.
- Sulistyorini, S. (2022). Teori-Teori Implementasi dan Adopsinya dalam Pendidikan. In *Imajinasi dan Refleksi Krisis Pengembangan Pendidikan Islam: Studi Pemikiran, Konsep, dan Pengalaman Baik*. Trenggalek: Penerbit Indonesia Imaji.
- Syamsuddin, N., Simbolom, G. A. H., Surni, Resyi, Bugis, H., Towe, M. M., Guntur, M., Maulidah, S., Taufik, M., Presty, M. R., & Pitri, A. D. (2023). *Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *The Developed and Developing World* (Edisi 11). New York: Addison-Wesley.

- Tumurang. (2024). *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Cendter of Academic Publishing Service.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK57829/kebijakan-publik-teori-proses-dan-studi-kasus>

JURNAL ARTIKEL ILMIAH

- Andini, D., Widodo, D., & Radjikan. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Berbasis Digital pada Aplikasi KLAMPID New Generation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 173–181.
- Aprilia, S. N., Kusbandrijo, B., & Rochim, A. I. (2022). Implementasi E-Goverment pada Aplikasi PDS-Pajak Daerah Sidoharjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(01), 81–90.
- Beni, S., Atlantika, Y. N., Salfarini, E. M., Usman, & Jewarut, S. (2026). Peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Dalam Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Daerah Perbatasan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 9(1), 145–153.
- Hani, S., Sumar'in, & Maskupah. (2025). Dampak Positif Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Terhadap Ekonomi dan Sosial Masyarakat Perbatasan Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, 9(2), 109–119.
- Hidayat, A., & Awaliyanto, S. (2025). Evaluasi Dampak Infrastruktur Plbn Terhadap Perekonomian Dan Konektivitas Wilayah Perbatasan. *Netizen: Journal of Society and Bussiness*, 1(12), 759–766.
- Lay, J. R. . B., & Wahyono, H. (2018). *Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 14(1), 29–39.
- Lobo, F. N., Arman, Y., & Soro, E. T. G. (2026). Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Napan Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2894–2900.
- Mainassy, F., Lisantri, E., & Suardi, S. (2026). Transformasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Laut Sebagai Simpul Konektivitas Strategi dalam Kerangka BIMP-EAGA Vision 2035. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1).

- Maisondra, & Timur, F. A. C. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(2), 210–225.
- Orocomnal, A. M., Wiratma, H. D., & Subandi, Y. (2025). Peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin Dalam Mendukung Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Timor Leste Pasca Pandemi Covid-19 Tahun 2022-2025. *Jurnal Ilmiah Multidisipkin*, 3(11).
- Sari, F. L. (2025). *Implementasi dan Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pengembangan UMKM Syariah di Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Siahaan, M. E., Saragih, J., & Malau, Y. T. I. (2026). Pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 4(1).
- Suryawijaya, R. L. J., Hadiwijoyo, S. S., & Simanjuntak, T. R. (2025). Pos Lintas Batas Negara Serasan Sebagai Strategi Pertahanan Indonesia di Perbatasan Natuna. *201 Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 9(2), 201–215.
- Tobu, E., Arman, Y., & Mamengko. Kathrine Maharani. (2023). Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dan Negara Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(5), 10–24.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

WEBSITE

- Akashi, N. U. (2025). *Berapa Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2025? Ini Daftar Menurut Data Terbaru*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7912335/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia-tahun-2025-ini-daftar-menurut-data-terbaru/amp>
- BNPP. (2024). *PLBN Serasan, Garda Terdepan Indonesia di Perbatasan Laut Natuna*. Bnpp.Go.Id. <https://bnpp.go.id/berita/plbn-serasan-garda-terdepan-indonesia-di-perbatasan-laut-natuna>
- BNPP. (2025a). *PLBN Serasan Jadi Wadah Kolaborasi dan Kreativitas Masyarakat Perbatasan melalui Serasan Festival 2025*. Bnpp.Go.Id. <https://bnpp.go.id/berita/plbn-serasan-jadi-wadah-kolaborasi-dan-kreativitas-masyarakat-perbatasan-melalui-serasan-festival-2025>
- BNPP. (2025b). *PLBN Serasan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata di Batas Negara*. Bnpp.Go.Id. <https://bnpp.go.id/berita/plbn->

serasan-sebagai-penggerak-pertumbuhan-ekonomi-dan-pariwisata-di-batas-negara

BNPP. (2025c). *PLBN Sota Sambut Kunjungan Gubernur Papua Selatan, Dorong Penguatan Ekonomi dan Layanan Perbatasan RI-PNG*. Bnpp.Go.Id. <https://bnpp.go.id/berita/plbn-sota-sambut-kunjungan-gubernur-papua-selatan-dorong-penguatan-ekonomi-dan-layanan-perbatasan-ripng>

BNPP. (2025d). *Pulau Serasan Rawan Terisolasi, Masyarakat Minta Akses Transportasi Laut*. Bnpp.Go.Id. <https://bnpp.go.id/berita/pulau-serasan-rawan-terisolasi-masyarakat-minta-akses-transportasi-laut>

BNPP. (2026). *BNPP RI Genjot Ekspor Perbatasan, PLBN Entikong Sumbang Devisa Rp93,6 Miliar Sepanjang 2025*. Bnpp.Go.Id. <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-ri-genjot-ekspor-perbatasan-plbn-entikong-sumbang-devisa-rp936-miliar-sepanjang-2025>

BPKP. (2024). *Resmikan 7 PLBN Terpadu, Presiden Jokowi Tegaskan Perbatasan Sebagai Wajah Indonesia*. Bpkp.Go.Id. <https://www.bpkp.go.id/id/berita/lxZ8/resmikan-7-plbn-terpadu-presiden-jokowi-tegaskan-perbatasan-sebagai-wajah-indonesia>

Kencana, M. R. B. (2025). *Indonesia Bakal Bangun 8 Pos Lintas Batas Negara Baru*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/amp/6035479/indonesia-bakal-bangun-8-pos-lintas-batas-negara-baru>

Merdeka. (2022). *Nawacita adalah 9 Agenda Prioritas Pemerintah Jokowi-JK, Ini Penjelasannya*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/amp/jatim/nawacita-adalah-9-agenda-prioritas-pemerintah-jokowi-jk-ini-penjelasannya-klm.html>

UNDANG-UNDANG

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (2019)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat (2015)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (2010)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (2008). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-43-tahun-2008>